

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.*
- *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tentang Pemberantasan Korupsi.*
- *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*
- *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.*
- *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Perlindungan Korban.*
- *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.*
- *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

B. Buku

- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran: Whistleblowing Sistem*, Bandung: Telkom University, 2013.

Sumardi, Barda A. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1990.

Sumardi, Aris Irawan. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.

Sumardi, L. N. *Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2006, Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Kawan Pustaka, 2007.

Subsidiari, Lies. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban: Telaah pada Regulasi, Kelembagaan, Teori maupun Praktik Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2023.

Yanto, O. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2020.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Wijono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wijaya, Firman. *Whistleblowers dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku, 2012.

C. Lain-Lain

Andina, Jadmiko, Arya. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2023.

Anshori. "Patologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.3 No. 2 Tahun 2017.

Barapa, Meiggie P, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi", *Jurnal Hukum*, Vol.1 No. 2 Tahun 2013.

Cikal, Alifa, "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri", *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2022.

Djamilianto, Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hetty Wawancara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 28 Maret 2024.
Hasanah, "Perlindungan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 28 Maret 2024.
Konsumen atas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia", *Jurnal Hukum*,
Vol. 3 No. 2 Tahun 2004.

Intan Rosidi, "Kedudukan *Whistleblower* Dalam Mengungkap Tindak Pidana
Korupsi Pengadilan Barang dan Jasa Pemerintah", tersedia di:
[http://repository.ubharajaya.ac.id/25490/2/201810115043_Intan%20Rosidi](http://repository.ubharajaya.ac.id/25490/2/201810115043_Intan%20Rosidi%20di%20BAB%201.pdf)
di [BAB%201.pdf](http://repository.ubharajaya.ac.id/25490/2/201810115043_Intan%20Rosidi%20di%20BAB%201.pdf), Diakses tanggal 12 Februari 2024.

Jopa, Abdanev. Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
bagian Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. *Wawancara*.
Jakarta, Kamis 28 Maret 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, "*Whistleblower's System*",
Tersedia di: <https://kws.kpk.go.id/>. Diakses tanggal 12 Februari 2024.

Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia",
Disertasi S2 Fakultas Hukum, Surakarta: Universitas Sebelas Maret
Tahun 2003.

Robert Klitgaard, "Membasmi Korupsi Edisi kedua", Tersedia di:
<http://repository.untagsby.ac.id/9149/4/Bab%201.pdf> Diakses pada 12
Februari 2024.

Saepulloh, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistlelower* (saksi
pelapor) dalam kasus Tindak Pidana Korupsi: studi Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban", *Skripsi Fakultas Hukum*, Bandung: UIN
Sunan Gunung Djati Tahun 2023.

Setiono, "*Rule Off Law*", *Disertasi S2 Fakultas Hukum*, Surakarta: Universitas
Sebelas Maret Tahun 2004.

Sucana Arvana, "Kedudukan *Whistleblower* Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam
Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1 Tahun 2017.

Suryadi, Dedi. Anggota Penyidik Kepolisian Resor Bogor Kota. *Wawancara*.
Bogor, Selasa 30 Januari 2024.

Susilo, Eka, Inspektur Polisi Satu Kepolisian Resor Bogor Kota. *Wawancara*.
Bogor, Selasa 30 Januari 2024.

Tika Widiastuti, "Maqashid Syariah Sebagai Alternatif Model Pengukuran Korupsi", tersedia di: <https://unair.ac.id/maqashid-syariah-sebagai-alternatif-model-pengukuran-korupsi>, Diakses pada 12 Februari 2024.

Widayati, "Negara Hukum Konstitusi & Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No.1 Tahun 2016.

Widiastuti Tika, "Maqashid Syariah Sebagai Alternatif Model Pengukuran Korupsi", tersedia di: <https://unair.ac.id/maqashid-syariah-sebagai-alternatif-model-pengukuran-korupsi>, Diakses pada 5 Desember 2023.